

Menyingkap Tabir di Balik Peristiwa Malapetaka 15 Januari (MALARI) 1974

Oellien Noeha

Pendidikan Sejarah, Universitas Siliwangi

Email: oelliennoeha@gmail.com

Abstract

This study aims to find out about: (1) the background of the events that preceded the MALARI Incident, (2) the chronology of the Malapetaka Event on January 15, 1974, and (3) the government blamed PSI-Masyumi, (4) Hariman Siregar's testimony, (5)) The Ramadi document that cornered General Soemitro, and (6) General Soemitro's response to the Ramadi document, and (7) A new round of New Order government policies. This study uses historical research methods according to Kuntowijoyo. The results of this study indicate that the events that preceded the Malari incident were caused by the economic crisis in the early 70s, rampant corruption, collusion and nepotism as well as the involvement of the military which infiltrated students and the interference of foreign capital. Apart from that, the existence of a feud between the two government employees, namely Ali Moertopo as assistant to the president and Soemitro as the commander of the chief of security and security forces, was also the background to the Malari incident. The Malari incident reached its peak on January 15, 1974 when the Japanese Prime Minister visited Jakarta. The students welcomed the Prime Minister of Japan with a demonstration demanding the 3 demands of the people or (Tritura). The action was attended by students from various universities in Java. Apart from that, there was the involvement of the general public to thugs, thieves and other persons who caused chaos in the Malari incident. The Malari incident ended with the arrest of several University of Indonesia students and other parties involved in the demonstration. Even the chairman of DMUI Hariman Siregar was also detained and made a suspect in this incident. As a result of this event, President Suharto changed his leadership attitude.

Keywords: *Malari Incident, Student Action, Ramadi Document.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: (1) Latar Belakang terjadinya peristiwa-peristiwa yang mendahului Peristiwa MALARI, (2) kronologis Pristiwa Malapetaka 15 Januari 1974, dan (3) pemerintah menyalahkan PSI-Masyumi, (4) Kesaksian Hariman Siregar, (5) Dokumen Ramadi yang menyudutkan Jendral Soemitro, dan (6) Tanggapan Jendral Soemitro soal dokumen Ramadi, serta (7) Babak baru dari kebijakan Pemerintah Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa yang mendahului peristiwa Malari ini diakibatkannya kerisi ekonomi di awal tahun 70-an, maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme serta keterlibatan militer yang menyusupi mahasiswa serta adanya campurtangan modal asing. Selain itu, adanya perseteruan antara kedua pegawai pemerintah yakni Ali Moertopo sebagai asisten presiden dan Soemitro sebagai pangkoptantib juga menjadi latar belakang peristiwa Malari. Peristiwa Malari mencapai puncaknya pada 15 Januari 1974 saat kedatangan Perdana Menteri Jepang ke Jakarta. Para mahasiswa menyambut Perdana Menteri Jepang dengan aksi demonstrasi yang menuntut 3 tuntutan rakyat atau (Tritura). Aksi tersebut diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai universitas di Pulau Jawa. Selain itu, ada keterlibatan masyarakat umum hingga preman, pencuri dan oknum lainnya yang membuat huru-hara dalam peristiwa Malari. Peristiwa Malari berakhir dengan ditahannya beberapa mahasiswa Universitas Indonesia dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam aksi demonstrasi. Bahkan ketua DMUI Hariman Siregar pun ikut ditahan dan dijadikan tersangka dalam peristiwa ini. Alhasil dari peristiwa ini membuat presiden Soeharto merubah tonggak sikap kepemimpinannya.

Kata kunci: *Peristiwa Malari, Aksi Mahasiswa, Dokumen Ramadi.*

Pendahuluan

Kekuasaan Orde Lama resmi digantikan dengan Orde Baru pada tanggal 12 Maret 1967. Pergantian tampuk kepemimpinan ini pun menyebabkan sang proklamator harus digantikan oleh Jendral Soeharto yang kemudian dilantik menjadi presiden Republik Indonesia. Pergantian kepemimpinan ini pun memiliki ciri dengan adanya sebuah pergantian nama yang dahulu Orde Lama diganti dengan sebutan Orde Baru guna membedakan antara kekuasaan pada masa Presiden Soekarno dengan penguasa baru yaitu Presiden Soeharto.

Dibawah pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto dapat mempertahankan tampuk kepemimpinannya di Indonesia selama 32 tahun, Soeharto yang telah mampu menunjukkan cengkramannya yang kuat dalam menjaga kekuasaannya (Hadi and Kusuma 2006). Dibawah kepemimpinan Orde Baru Presiden Soeharto pun memberikan peran sosial politik yang cukup besar pada ABRI khususnya Angkatan Darat. Dwi Fungsi ABRI yang ada pada masa Orde Baru sendiri digunakan untuk menjalin hubungan Partnership antara sipil dengan ABRI yang dinilai balance menurut pendapat dari Ali Moertopo, maka dapat kita artikan bahwa hubungan yang terjalin anantara sipil dengan ABRI perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab supaya dapat menciptakan sebuah keseimbangan dan ketepatan sesuai dengan harapan presiden pada setiap keadaan dan kebutuhan yang seharusnya (Hadi and Kusuma 2006).

Pada masa ini pula presiden Soeharto tidak membuka ruang kebebasan pada rakyatnya guna ikut serta untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pengambilak kebijakan. Karena hal tersebut menyebabkan pola pemerintahan pada masa Orde Baru sangat buruk, hal ini kemudian mengakibatkan Indonesia harus mengalami krisis moneter. Menurut A. Yogaswara yang dikutip dari (Lailah, Syah, and Syaiful 2013) Presiden Soeharto mencatat, bahwa pada tahun 1965 sudah terjadi inflasi yang cukup besar dan mencapai angka 500% bahkan harga beraspun mengalami kenaikan mencapai 900%. Sedangkan defisit anggaran belanja pada tahun itu mencapai angka 300% dari pemasukan yang ada, hal ini pun belum ditambah dengan hutang luar negeri yang harus dibayar pada tahun 1966 (Yogaswara, 2009: 22). Maka dari itu solusi satu-satunya menurut Presiden Soeharto adalah dengan cara mencari bantuan luar negeri secepatnya.

Kemudia guna mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru maka dikeluarkanlah sebuah Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing nomor 1 tahun 1967 yang kemudian diikuti dengan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri nomor 6 tahun 1968. Yang mana kedua undang-undang ini sebenarnya diperuntukan guna membuka kembali prekonomian dan meningkatkan kembali dunia usaha pada sektor swasta (Lailah et al. 2013). Selanjutnya pemerintahan Orde Baru membuka peluang pada negara-negara asing guna bekerjasama dan menanamkan investasi perusahaanya di Indonesia. Bahkan karena Presiden Soeharto dianggap sebagai penyelamat Indonesia dari komunisme sehingga tidak sulit baginya guna mendapatkan bantuan dari negara-negara Barat (Yogaswara 2009). Bahkan negara Jepang pun tidak ragu guna menanamkan modalnya di Indonesia. Amerika dan Jepang merupakan dua negara yang tercatat sebagai penanam modal terbesar di Indonesia saat itu. Sebagaimana tercatat dalam buku Yogaswara tentang Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 [MALARI] bahwa proyek Amerika yang ada di Indonesia pada tahun 1973 mencapai US \$ 935 juta dengan jumlah proyek sebanyak 115 proyek, sedangkan Jepang mencapai US \$ 534 Juta dengan total proyek sebanyak 135 (Yogaswara, 2009).

Setelah itu, penanaman modal asing khususnya dari Jepang mulai mengalir ke Indonesia.

Produk-produk yang diluncurkan Jepang juga mulai merebak di pasaran Indonesia. Akibat dari penanaman modal asing tersebut, kesejahteraan sosial dan industri lokal mulai merosot. Di samping itu, Perdana Menteri Jepang pun akan mengunjungi Indonesia untuk melihat hasil investasinya. Hal tersebut menimbulkan adanya demonstrasi dari para mahasiswa sebagai bentuk penolakan modal asing yang justru menimbulkan permasalahan bagi kehidupan masyarakat. Demonstrasi tersebut terjadi sebagai reaksi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat baik dalam kondisi sosial, politik maupun ekonomi. Para mahasiswa menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah yang bertujuan untuk perubahan kondisi negara ke arah yang lebih baik (Lailah et al. 2013).

Dalam perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia, mahasiswa memiliki peran penting sebagai *agent of change* dalam menggagas perubahan negara ke arah yang lebih baik. Banyak sekali sejarah yang mencatat tentang keterlibatan mahasiswa dalam panggung peristiwa sejarah Indonesia terkhusus pada ranah sosial dan politik (Wirajati, 2018). Bahkan sampai dengan detik ini para mahasiswa seluruh Indonesia masih tetap berperan dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat guna menuju Indonesia yang lebih maju.

Sebuah catatan sejarah mengenai pergerakan mahasiswa pada masa Orde Baru terkhusus pada tahun 1974 yang kemudian kita kenal dengan sebutan Peristiwa Malapetakan 15 Januari (MALARI). Pada demonstrasi tersebut para mahasiswa menuntut dan memprotes pemerintahan Orde Baru karena dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada pada masa itu (Rum Aly dalam Lailah et al., 2013). Dari kejadian demonstrasi ini tercatat banyak sekali kerugian yang dialami dari peristiwa tersebut, yang diantaranya kerugian materil dan non-materil. Tercatat ada 11 orang meninggal dunia, 17 orang dilaporkan mengalami luka serius, dan 120 orang mengalami luka ringan, serta kerugian lainnya seperti kerusakan kendaraan berupa mobil sejumlah 807 unit, serta 187-unit kendaraan bermotor yang dibakar dan dirusak oleh masa pada saat demonstrasi dan 145 gedung perkantoran dan pemerintahan dirusak dan dibakar.

Pistiwa ini dirasa menarik guna dijadikan sebuah kajian dalam karya tulis, hal ini karena peristiwa Malari dinilai sebagai sebuah tonggak kekerasan dan kerusuhan yang cukup besar pada masa Orde Baru. Setelah adanya peristiwa ini, pemerintahan Orde Baru mulai menyusun jalannya pemerintahan kearah yang lebih baik. Dalam artikel ini penulis akan menyajikan sebuah kajian mengenai Dalang Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 yang meliputi Latar Belakang terjadinya peristiwa-peristiwa yang mendahului Peristiwa MALARI, kronologis Pristiwa Malapetaka 15 Januari 1974, pemerintah menyalahkan PSI-Masyumi, Kesaksian Hariman Siregar, Dokumen Ramadi yang menyudutkan Jendral Soemitro, Tanggapan Jendral Soemitro soal dokumen Ramadi, Babak baru dari kebijakan Pemerintah Orde Baru.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut (Kuntowijoyo, 1995: 69), penelitian sejarah melalui beberapa tahapan yaitu (1) Pemilihan topik, (2) Heuristik atau (pengumpulan sumber), (3) Kritik sumber, (4) Interpretasi, dan (5) Historiografi atau penulisan. Pemilihan topik merupakan tahap menentukan topik penelitian yang didasarkan pada pendekatan psikologis maupun intelektual penulis. Heuristik merupakan tahap pengumpulan sumber baik dari sumber primer atau sekunder, pada karya tulis ini penulis menggunakan sumber sekunder berupa artikel ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan.

Kritik sumber merupakan tahap untuk menentukan validitas dan reabilitas sumber yang terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal, secara eksternal melalui bentuk dan kondisi fisik adapun secara internal dari isi sumber sejarah. Interpretasi merupakan tahap menghubungkan fakta-fakta sejarah yang sudah melalui tahap kritik sumber. Historiografi merupakan tahap penulisan karya sejarah dengan menggabungkan fakta-fakta dari sumber sejarah.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Terjadinya Peristiwa-Peristiwa yang Mendahului Peristiwa MALARI

Presiden Soeharto menanggapi rangkaian demonstrasi serta protes terhadap jalannya pemerintahan Orde Baru, dengan menunjukkan reaksi yang sangat keras. Karena ketika memasuki awal tahun 70-an menjadi masa-masa sulit pertama yang harus dilalui oleh sang Presiden. Masa sulit ini merupakan tantangan baginya untuk dapat menghadapi kelompok-kelompok tertentu yang dinilai ingin menggoyangkan kursi kekuasaannya. Mengutip dari Yogaswara (2009) “mereka mencari kesempatan untuk bisa mengganggu kesetabilan nasional” pernyataan ini disampaikan oleh Soeharto atas protes-protes yang disampaikan padanya. Namun sikap yang tegas ditunjukkan oleh presiden Soeharto dengan memberikan jawaban atas protes-protes tersebut “saya pernah mengingatkan mereka bahwa saya tidak akan memberikan cara-cara yang tidak demokrasi dan akan menindak dengan tegas bila mereka melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas nasional” (G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., dalam Yogaswara, 2009). Ancaman tersebut sudah menyulut emosi dan kesabaran sang Presiden terhadap rangkai peristiwa yang mungkin dapat menjegal dan memenangkan pemilu 1971.

1. Mahasiswa Mulai Meneriakan Slogan-Antikorupsi

Memasuki tahun 1970-an para mahasiswa mulai melakukan gerakan-gerakan demonstrasi dengan turun ke jalanan, selain itu mereka pun menempelkan poster-poster diberbagai jalan yang memenuhi hampir seluruh sudut kota Jakarta. Dalam poster itu sendiri mereka menyuarakan agar pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan korupsi yang terjadi di era Orde Baru (Yogaswara, 2009). Sebenarnya pemicu utama dari aksi yang dilancarkan oleh kaum intelektual dan rakyat kecil ini adalah kemuakan mereka terhadap praktik korupsi ditingkat elit politik. Akibat dari banyaknya permainan elit politik yang menyebabkan praktik korupsi maka para mahasiswa pun mengambil sebuah inisiatif untuk membentuk Komite Anti Korupsi (KAK) yang diketuai oleh Arief Budiman, Syahrir, dan Marsilam Simandjuntak (Ramadhan K.H. dalam Yogaswara, 2009). Bahkan gerakan ini juga diikuti oleh mahasiswa dair Bandung, mereka datang ke Jakarta dan ikut menempelkan poster-poster yang berisi tuntutan-tuntutan kepada pemerintah guna menangani kasus korupsi secara serius. Poster-poster ini sendiri banyak ditempelkan di kantor Pertamina dan Kejaksaan Agung.

Guna menenangkan aksi masa yang diprakarsai oleh mahasiswa, kemudian Presiden Soeharto menerima perwakilan demonstran guna berdialog bersamanya di Istana. Kemudian hasil dari dialog tersebut adalah dengan dibentuknya Komisi Empat Anti Korupsi yang didirikan sebagai tindak lanjut pemerintahan Orde Baru dalam menghadapi kasus korupsi. Adapun ketua dari Komisi Empat Anti Korupsi ini adalah; Wilopo, S.H (Politikus PNI), kemudian sekertaris nya yaitu Mayjen Sutopo Juwono, dan Muhammad Hatta (mantan wakil Presiden) diamanahi sebagai penasihat. Sementara

anggotanya terdiri dari I.J. Kasimo (Partai Katolik), Johannes (mantan Rektor UGM) dan Anwar Tjokroaminoto dari (PSII). Tokoh-tokoh tersebut yang dipercayai kebersihannya (Dwipayana, G. 1989).

2. Munculnya Golput (Golongan Putih)

Ali Moertop yang memegang kendali mulai memainkan perannya guna memaanuver gerakan-gerakan politik Golkar, sampai pada tahun 1971 Golkar keluar menjadi pemenang dalam pemilu ini. Dengan kemenangan mutlak sebesar 26,8% meskipun tak mengherankan, tetap saja terasa sangat janggal pada kemenangan ini (Elson, 2001). Bahkan beberapa tokoh muda pun buka suara karena mencium baubau ketidak beresan dalam ajang demokrasi ini. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah; Adnan Buyung Nasution, Imam Waluyo, Jusuf A.R., dan J.C. Prince menyuaran pendapatnya dalam kontestasi politik 1971 dan memproklamirkan diri kedalam golongan putih dalam kontestasi politik 1971 (Van Dijk, 2000).

3. Demonstrasi Penolakan Proyek TMII

Seolah tak peduli akan sorotan yang diterimanya, Presiden Soeharto dengan ibu Tien Soeharto malah melontarkan sebuah ide guna membangun sebuah megaprojek Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan total anggaran menembus 10,5 miliar. Bahkan isu yang tersebar bahwasannya ide ini muncul dari sang Ibu Negara, dan rencananya dia sendiri yang akan menjadi ketua yayasan dari pembangunan megaproyek tersebut. Dalam polemik megaprojek ini Presiden Soeharto pun memberikan penjelasan, “Mereka menghawatirkan bahwa megaproyek ini hanya akan mangkrak dan menjadi pemborosan sajah tanpa arti” (G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., 1989). Apapun alasan sang presiden, proyek ini tetap saja membuat keprihatinan pada para teknokrat. Kondisi prekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik sajah pada saat itu malah dipaksakan untuk membangun megaprojek berdana besar. Bila kita melihat besar nominal guna pembangunan megaprojek TMII ini, lebih baik kita gunakan untuk memperbaiki keadaan prekonomian bangsa lebih dulu. Bahkan terdapat beberapa teknokrat yang mengundurkan diri karena mendengar bahwa target pembangun TMII yang diinginkan Ibu Tien Soeharto harus sudah berdiri tegak ditahun 1975.

Para mahasiswa, di awal tahun 1972 kemudian kembali turun kejalan. Dalam demonstrasi ini mereka membentuk sebuah gerakan penghemat yaitu (GAS) Gerakan Akal Sehat dan Gerakan Penyelamat Uang Rakyat di Jakarta serta Bandung. Para mahasiswa ini menentang pembangunan megaprojek TMII karena dinilai sama dengan proyek “Mercusuar” yang dilakukan Presiden Soekarno pad masa Orde Lama. Semua kritik yang ditujukan pada ibu Negara ini, membuat sang Presiden breaksi keras, “Saya tahu bahwa terdapat kelompok tertentu yang ingin membuat isu politik dari proyek yang kami cita-citaka kalau mereka tidak mengerti kalimat ‘tidak akan saya biarkan’ terus terang sajah akan saya tindak” (G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., 1989). Maka megaprojek TMII ini tetap dijalankan sesuai dengan keinginan sang ibu Negara.

4. Masalah Bulog

Beriringan dengan permasalahan pembangunan megaprojek TMII, harga-harga bahan pokok pun mengalami kenaikan yang disebabkan kenaikan harga minyak. Akibat dari itu banyak dari kalangan bawah serta mahasiswa yang meronta-ronta akibat kekurangan beras. Rakyat pun mengalami kelaparan, Badan Urusan Logistik (BULOG)

sebagai badan yang bertugas mengelola kebutuhan beras dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya. Kemudian pada akhir tahun 1972, masyarakat kelas bawah mulai menyoroti segala bentuk pelanggaran dan penyelewengan yang terjadi dalam Bulog. Bahkan kaum teknokrat sendiri mengaspirasikan suara mereka yang menggambarkan ketidak sukaan pada lembaga ini. Kemudian gerakan mahasiswa yang tergolong dalam kelompok Gerakan Anti-Lapar membuat kepala Bulog Jendral Achmad Tirtosudiro harus meninggalkan kursinya sebagai kepala Bulog 1972 (Ramadhan K.H., 1994).

5. Isu Kepemimpinan Nasional

Diakhir tahun 1973 banyak sekali diskusi-diskusi tentang modal asing dan permasalahan korupsi yang semakin memuncak. Tepat pada tanggal 31 Desember 1973, telah terjadi perkumpulan mahasiswa sebanyak 1500 orang yang tergabung dari Jakarta, Bandung, dan Padang yang berkumpul di halaman Fakultas Kedokteran UI. Dalam perkumpulan tersebut mereka mengagendakan malam tirakatan sebagai wujud keprihatinan mereka terhadap kondisi masyarakat Indonesia saat itu. Dalam waktu singkat, arah diskusi tentang modal asing dan permasalahan korupsi yang sudah memuncak ini bermuara terhadap isu seputar kepemimpinan nasional. Kemudian dikalangan mahasiswa melontarkan ide-ide untuk menggantikan Presiden Soeharto dengan calon pemimpin lainnya. Namun, masalahnya siapa yang berani guna mengajukan diri menjadi Presiden RI?

Kronologis Pristiwa Malapetaka 15 Januari 1974

Puncak dari peristiwa Malari terjadi pada saat Perdana Menteri Jepang yaitu Kakuei Tanaka berkunjung ke Jakarta pada tanggal 14-17 Januari 1974. Mahasiswa merencanakan untuk menyambut Kakuei Tanaka dengan demonstrasi (Distrianto & Sukardi, 2018). Mereka ingin menyampaikan kepada Tanaka bahwa bangsa Indonesia masih memiliki kebanggaan nasional dan tidak bisa dibeli dengan harta, yang dimaksud di sini adalah modal asing dari Jepang.

Pada tanggal 14 Januari 1974, para mahasiswa melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes kedatangan Perdana Menteri Jepang di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma. Mahasiswa menyampaikan keresahan masyarakat dan penolakan atas modal asing terutama dari Jepang yang mengalir ke Indonesia. Mereka menganggap bahwa Jepang memberikan modal asing ke Indonesia hanya mencari keuntungan ekonomi saja tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Aksi demonstrasi yang dilakukan ini belum terlalu memanas karena para mahasiswa merencanakan untuk melancarkan aksinya di keesokan hari pada 15 Januari (Jazimah, 2013). Selain itu, mereka juga mengajukan tiga tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura yang berisi tuntutan untuk membubarkan asisten pribadi, menurunkan harga, dan memberantas korupsi (Fajar dalam Distrianto & Sukardi, 2018).

Pada 15 Januari 1974, para mahasiswa menjalankan aksi demonstrasi yang telah direncanakan sebelumnya. Pada tanggal ini merupakan puncak dari aksi demonstrasi tersebut. Para demonstran yang terdiri dari sebagian besar mahasiswa dari berbagai kampus di Pulau Jawa berkumpul di Sekretariat Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia untuk mempersiapkan melangsungkan aksi. Mereka mulai berjalan sekitar pukul delapan pagi dari Salemba menuju Jalan Raden Saleh, Cikini, Gambir, dan Jalan Merdeka Timur hingga menuju Monumen Nasional dengan membawa tiga tuntutan yakni bubarkan asisten pribadi presiden, turunkan harga, dan

berantas korupsi (Padiatra, 2015).

Di pertengahan jalan, jumlah masa yang berdemonstrasi semakin bertambah. Tidak hanya mahasiswa, namun para pelajar dan masyarakat umum mengikuti aksi demonstrasi ini. Masa yang berdemonstrasi terbagi menjadi dua jalur, sebagian bergabung menuju lapangan Monumen Nasional dan sebagian menuju Universitas Trisakti. Mereka yang menuju lapangan Monas menurunkan bendera penyambutan Tanaka (Perdana Menteri Jepang) dan masa yang berdemonstrasi semakin terus bertambah dan bercampur menjadi satu (Distrianto & Sukardi, 2018).

Diantara ribuan masa yang terlibat dalam aksi demonstrasi ini, terjadi hal-hal tidak terduga. Dalam (Padiatra, 2015) dikatakan bahwa terdapat unsur-unsur yang tidak terkontrol di luar masa mahasiswa, yakni ada sekumpulan preman, perusuh, dan pencuri. Dalam (Sahasrad & Ridwan, 2020) dikatakan bahwa seorang bernama Bambang Trisulo telah merogoh kocek sebesar Rp. 30 juta untuk membayar preman, selain itu Roy Simandjuntak sebagai ketua persatuan pengemudi becak mengerahkan seluruh tukang becak di sekitar pasar senen. Oknum di luar mahasiswa itulah yang kemudian melakukan aksi di luar kendali mahasiswa seperti membakar mobil buatan Jepang dan kendaraan lainnya, mengobrak-abrik toko, membakar ban serta menghancurkan bangunan-bangunan seperti kantor importer produk Jepang dan perusahaan lainnya. Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (Hariman Siregar) pun tidak dapat mengendalikan tindakan tersebut, padahal sebelumnya mahasiswa tidak pernah merencanakan aksi demonstrasi yang melibatkan kerusuhan seperti hal tersebut.

Hal tersebut juga diungkapkan dalam (Lailah et al. 2013) yang mengatakan bahwa beberapa saksi menyebutkan dalam peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 banyak golongan non-mahasiswa yang ikut dalam demonstrasi. Golongan tersebut seperti preman, tukang becak, sampai kyai yang berasal dari luar daerah. Mereka sengaja didatangkan dan disusupkan ke dalam gerakan mahasiswa untuk menambah huru-hara aksi tersebut. Diketahui bahwa oknum-oknum yang sengaja disusupkan itu adalah orang-orang yang diperintah oleh kelompok Ali Moertopo (asisten pribadi Soeharto). Sementara saingan dari Ali Moertopo, yaitu Soemitro sebagai Pangkopkamtib justru seperti memberikan celah kepada para mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi. Soemitro berharap aksi tersebut membuat Presiden Soeharto menyingkirkan asisten pribadinya terutama Ali Moertopo.

Akibat dari aksi-aksi yang begitu brutal, yang sebenarnya bukan dilakukan oleh kelompok mahasiswa, akhirnya Jenderal Soemitro menemui para demonstran untuk menenangkan aksi mereka yang sangat brutal. Soemitro memberi janji kepada mahasiswa bahwa tuntutan-tuntutan mereka akan dipenuhi. Namun saat itu Jenderal Soemitro menemui para demonstran dengan menggunakan mobil buatan Jepang, hal ini semakin menimbulkan kemarahan para demonstran. Soemitro kemudian mengancam kepada para demonstran bahwa aksi tersebut dianggap sebagai penghianatan kepada negara, dan jika itu tidak dihiraukan oleh para demonstran maka keamanan akan bertindak untuk menuntaskan aksi ini. Soemitro khawatir jika aksi demonstrasi ini akan mempermalukan Presiden Soeharto di depan Perdana Menteri Tanaka (Distrianto & Sukardi, 2018).

Kerusuhan masa tetap terus berlangsung walaupun sudah ada seruan untuk tenang dari berbagai organisasi. Hingga malam tanggal 16 Januari 1974, ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (Hariman Siregar) menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Ia juga menampilkan diri di Televisi dan membacakan deklarasi dari Mahasiswa Universitas Indonesia

yang menentang kekerasan yang telah terjadi (Padiatra, 2015). Selain Hariman Siregar, ada juga beberapa mahasiswa dari Universitas Indonesia yang ditahan oleh pihak berwajib. Peristiwa yang cukup besar ini telah menimbulkan banyak kerugian diantaranya tercatat 11 orang meninggal dunia, 300 orang mengalami luka-luka, 120 orang mengalami luka ringan, dan 775 orang ditahan pihak berwajib. Sementara itu, 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak dan dibakar, 144 bangunan rusak berat dan sekitar 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan (Sahasrad & Ridwan, 2020).

Pemerintah menyalahkan PSI-Masyumi

Dalam buku kuning Peristiwa 15 Januari 1974 karya Marzuki Arifin yang terbit dua bulan setelah peristiwa 15 Januari ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya terdapat dalang-dalang dibalik terjadinya Peristiwa ini yang tidak lain dari golongan bekas PSI dan Masyumi. Dari hal ini kita dapat memahami perspektif dari sudut pandang pemerintah terhadap kejadian 15 Januari 1974, terkhusus pada siapa tuduhan dalang dibalik peristiwa Malari.

Tertudahnya PSI-Masyumi

Pada tanggal 28 Januari 1974, Presiden Soeharto telah menyelenggarakan pertemuan antara pimpinan partai politik dan Golkar. Dalam pertemuan ini mereka merumuskan mengenai peristiwa 15 Januari 1974 yang dinilai didalangi oleh oknum-oknum eks PSI, Masyumi dan PNI yaitu Ali Surachman yang dikatakan "sama bahannya nya dengan bekas PKI" (Marzuki Arifin, 1974: 11 dalam Suwirta, 2018). Pada 21 Januari 1974, sebelumnya Aspri Presiden yaitu Jendral Ali Moertopo telah menyatakan bahwa peristiwa 15 Januari 1974 itu tergolong kedalam perbuatan subversif yang mengarah pada gerakan makar. Serta PSI dan Masyumi yang dianggap ada di belakang dari peristiwa ini. Bahkan keduanya didukung oleh pihak ketiga yaitu PNI. Dan hal ini diperkuat kembali dari apa yang disampaikan oleh Jendral M. Panggabean selaku Menhankam pada saat itu.

Sedangkan Pangkomkamtib Soemitro yang melaporkan kepada bapak Presiden menjelaskan bahwa terdapat indikasi keterlibatan dari pihak PSI dari terjadinya peristiwa Maari. Informasi ini didapatkan oleh pak Soemitro dari informenya di Jawa Timur, namun karena informasi ini masih mengantung mengenai kebenarannya maka pangkomkamtib belum sempat mengeluarkan perintah untuk dapat menangkap orang-orang PSI yang dianggap ada dibalik peristiwa Malari 1974 (Cahyono, 1998).

Perjalanan Kelam PSI-Masyumi menjadi Organisasi Terlarang

Dalam buku yang ditulis oleh Marzuki Arifin menjelaskan bahwa PSI-Masyumi merupakan dua organisasi yang sejak lama gandrung terhadap aksi-aksi makar, namun hal tersebut selalu mengalami kegagalan karena tidak pernah mendapat dukungan dari rakyat (Marzuki Arifin dalam Lailah et al., 2013). Simpulan ini sebenarnya didapatkan dari hasil meruntutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan. Partai sosialis Indonesia (PSI) sangat erat kaitannya dengan para tokoh sosialis seperti Sutan Syahrir. Dengan bubarnya kabinet Syahrir akibat kegagalannya dalam perundingan Linggajati yang malah dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia sendiri, akibat dari adanya hal itu kemudian PSI terpecah menjadi dua golongan. Syahrir yang kemudian mendirikan partai Sosialis Indonesia sementara

Amir Syafruddin (Perdana menteri yang kemudian mewakili Indonesia dalam perjanjian Renville) mendirikan gerakan sayap kiri yang nantinya terlibat dalam peristiwa pemberontakan madiun 1948.

PSI kemudian dinilai memiliki jalinan hubungan dengan partai Masyumi-Natsir dalam hal ini (Natsir yang merupakan seorang tokoh NII di Sumatra Barat) beliau juga sangat beridealisme Sosialis dan Religius. Akibatnya kedua partai ini dinilai memiliki sebuah tujuan yang sama yaitu mendirikan pemerintahan yang liberal. Guna mencapai tujuannya itu, PSI-Masyumi juga terlibat dalam beberapa upaya guna merubah pancasila dan UUD 1945. Kemudian puncaknya meletus dalam pemberontakan PRRI/Permesta pada 15 Februari 1958. Akibat dari keterlibatan kedua partai tersebut maka pada tanggal 17 Agustus 1960 PSI-Masyumi resmi dibubarkan oleh Presiden Soekarno.

Dua tujuan Malari

Dengan berdasarkan informasi yang disebarluaskan oleh pihak pemerintah atas kejadian peristiwa Malari adalah bukti dari adanya pihak-pihak yang tidak senang dan ingin menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah di dalamnya. Oknum-oknum PSI yang bekerjasama dengan Masyumi, yang juga dibantu oleh pihak ketiga yakni oknum Sosialis yang dengan sengaha mendekati kader-kader muda guna menyebarkan isu-isu politik yang menyudutkan pemerintah. Bahkan banyak media masa, oknum sipil, serta oknum militer yang telah terlibat membantu gerakan PIS-Masyumi ini. Dijelaskan juga kalau mereka ingin menggerakkan massa guna mencapai tujuan utama mereka. Adapun tujuan yang pertama adalah menjatuhkan Aspri Presiden, Kopkamtib dan Dwi fungsi ABRI. Kemudian tujuan keduanya adalah ingin menggulingkan kepala negara (Presiden), mengantikan pancasila dan UUD 45. Sedangkan tujuan akhir dari keduanya adalah PSI ingin mendirikan pemerintahan Demokrasi Liberal, sedangkan Masyumi dikatakan ingin mendirikan Negara Islam (NII).

Konfrensi Pers Laksamana Soedomo

Kepala staf Kopkamtib Laksamana Soedomo setidaknya telah membeberkan lima informasi penting dari peristiwa Malari. Informasi ini sendiri didapatkan dari hasil mengorek informasi dari orang-orang yang ditahan dan dinilai memiliki keterkaitan atas peristiwa tersebut, yang diantaranya:

1. Adanya sebuah tindakan subversif yang dikonsepsikan menganut sebuah faham sosialisme yang bertujuan guna menggulingkan pemerintahan Orde Baru, mengubah UUD 45 dan Pancasila.
2. Dalam pergerakannya sendiri terdapat pembagian peran kelompok dengan tugasnya yaitu, ada kelompok konseptor, kelompok penggerak massa dan kelompok pelaksana.
3. Bahkan telah ada pematangan konsep situasi dilapangan dengan melancarkan sebuah isu-isu yang apriori serta negatif yang bersifat menghasut terhadap pemerintah, antara lain tentang keadaan sosial, ekonomi, budaya serta politik yang mana juga terdapat penyebaran isu terkait kebobrokan lembaga Aspri, Kopkatib dan Dwi Fungsi ABRI.
4. Juga terdapat gerakan dari golongan ekstrem lainnya dengan konsepsi dan sasaran yang menunggangi keadaan tersebut.

5. Terdapat golongan ekstem bekas-bekas partai terlarang yang sudah jelas tidak ingin melembaga dan melakukan gerakan-gerakan bawah tanah atau dikenal dengan sebutan OTB (Organisasi Tanpa Bentuk).

Adanya Dukungan dari Militer

Pemerintah yang juga mengakui bahwa terdapat oknum-oknum dari pihak militer yang ikut terlibat dalam perencanaan gerakan Malari. Dijelaskan bahwa PSI-Masyumi bekerjasama dengan oknum-oknum militer dari kalangan angkatan darat (AD) hal ini terjdakaren mereka sendiri tidak patuh pada Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, mereka yang terpengaruh oleh hal itu karena sematamata silau akan kekuasaan dan jabatan politik (Marzuki Arifin dalam Padiatra, 2015). Dan jelas dalam hal ini tokoh yang sangat disoroti adalah Pangkopkamtib Soemitro.

Pemerintah yang juga berhati-hati, mengeluarkan kecaman keras atas peran Pangkopkamtib Soemitro yang dinilai ikut terlibat memanaskan suasana. Kritik pak Soemitro atas pemuda yang berambut Gondrong, dianggap menjadi salah satu penyebab gejolak masalah yang muncul dan menyebabkan keresahan dikalangan generasi muda, sehingga membuka pintu bagi terjadinya makar.

PSI Mengendalikan Mahasiswa?

Sebagai motor penggerak dari gerakan massa yang ada, mahasiswa dituduh oleh pihak pemerintah bahwa mereka telah disusupi oleh orang-orang dari PSI melalui Group Diskusi Universitas Indoneisa (GDUI). Group diskusi yang berdiri pada tanggal 2 Juli 1968 yang didirikan oleh Dr. Soe Hok Gie, Heru Naskoro, Aulia Rachman, Dorajatun Kunjorojakti, Juwono Sudarsono dan M.B Gunadil. Para pendiri group diskusi ini sendiri dituduh kalau mereka beraliran sosialis. Bahkan dikatakan bahwa GDUI telah mewadahi orang-orang yang mewarisi paham sosialis PSI-Sutan Syahrir. Bahkan menurut (C. Van Dijk dalam Yogaswara, 2009) sekjen GDUI yang memiliki kesamaan nama dengan pendiri PSI itu.

Dijelaskan pula bahwa semenjak Hariman Siregar terpilih menjadi ketua DMUI, terjalin sebuah hubungan yang harmonis antara DMUI dengan GDUI. Bahkan tercatat bahwa Hariman sendiri sudah menjadi bagian dari GDUI sejak tahun 1972. Bahkan sebuah fakta menjelaskan bahwa Hariman yang merupakan menantu dari Prof. Sarbini yang merupakan seorang pentolan sosialis, membuat dugaan pemerintah semakin kuat bahwa demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan mahasiswa telah dikendalikan oleh orang-orang eks partai PSI. hal inilah yang disampaikan oleh Jendral Ali Moertopo kepada kepala polisi Widodo Budidarmo dengan elmen nonkampus. Namun semuanya masih menjadi tanda tanya besar apakah semua ini dilakukan orang-orang eks PSI guna menggulingkan pemerintahan Orde Baru.

Kesaksian Hariman Siregar

Hariman Siregar mengatakan "Bukan itu tujuan kami!" kala menjawab pertanyaan dari Wapangkopkamtib Laksamana Soedomo tentang keterlibatan mahasiswa pada kerusuhan yang terjadi pada 15 Januari 1974. Dari jawaban Hariman itulah yang kemudian membuat Pangkopkamtib kesal dan menuduh bahwa Hariman ingin melepaskan tanggungjawab nya. Akibatnya Soemitro langsung mengeluarkan surat penangkapan yang menyebabkan Hariman Siregar menjadi ketua DMUI tersingkat sepanjang sejarah, yang hanya memerintah selama

enam bulan sajah.

Terkait aksi yang dilakukan mahasiswa dipertengahan Januari 1974 dari kisah yang disampaikan oleh Hariman, "Bahwa pemerintah tidak memperhatikan rakyat, bahkan membiarkan harga sembako melonjak tinggi dan memanfaatkan kekuasaan hanya untuk kroni terdekatnya sajah. Oleh karenanya pemerintah perlu dikoreksi." (www.suarakarya-online.com). Hariman sendiri menyampaikan bahwa aksi-aksi yang dilakukan murni dari kekecewaan yang timbul terhadap pemerintah dan tidak ada campurtangan orang lain didalamnya. Bahkan ujar hariman sendiri "sebagai mahasiswa pada saat itu, saya tergerak guna melakukan aksi ketika pemerintah yang mengaku dilahirkan oleh mahasiswa malah menyimpang dari jalan awalnya.

Tuduhan Menjadi Antek PSI

Tuduhan terberat yang ditukan pada Hariman Siregar adalah soal hubungan kedekatannya dengan PSI. Bahkan isu ini telah berkembang sejak ia terpilih menjadi ketua DMUI. Hal ini dilihat dari penuhnya poster-poster yang memenuhi dinding kampus dengan tulisan-tulisan yang menuding bahwa Hariman dan sekjen GDUI yaitu Sjahrir merupakan "Antek dari PSI". Menurut orang-orang yang anti terhadap sosok Hariman, menjelaskan bahwa hubungan Hariman dengan PSI ini terbukti dengan adanya kedekatan ketua DMUI ini dengan GDUI yang dinilai bahwa didalamnya dihuni oleh orang-orang PSI. Pada akhirnya hal inilah yang membuat Hariman dipersalahkan dalam perannya pada peristiwa 15 Januari 1974. Hariman yang dijatuhi hukuman enam tahun kurungan dengan dipotong masa tahanan. Lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut, yaitu selama dua belas tahun penjara. Ini semua terjadi karena kurangnya alat bukti yang kuat, dan akhirnya memaksa pengadilan berakhir tanpa mengetahui pasti siapa dalang sebenarnya dari peristiwa Malari.

Ingin Soemitro Menjadi Presiden

Tidak dapat dipungkiri, dari kesaksian yang disampaikan di pengadilan, Hariman sendiri sempat berfikir guna menggantikan Soeharto dengan tokoh figur lain. Bahkan Ali Sadikin yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pernah ditanya oleh Hariman mengenai kesiapan nya untuk menjadi presiden jika diminta oleh rakyat. Namun satu nama yang paling dijagokan oleh Hariman sendiri adalah sosok Jendral Soemitro. Leonardo Tomaso mengaku bahwa ia pernah mendengar ucapan Hariman untuk menggantikan Soeharto dengan Soemitro. Namun hal tersebut disanggah oleh rekan-rekan Hariman. Apa yang terjadi kemudian menunjukkan bahwa Hariman beserta temannya memang menginginkan Soemitro untuk naik menjadi Presiden.

Dokumen Ramadi yang Menyudutkan Soemitro

Dengan adanya dokumen Ramadi memang langsung mematikan karir dari pak Mitro. Namun ironisnya Soemitro mengaku jikalau dia tidak pernah mengenal sosok Ramadi. "Dengar namanya pun saya belum pernah!" ujarnya (Cahyono, 1998), bahkan ia sendiri tidak pernah melihat dokumen Ramadi. Ramadi adalah seorang mantan Kolonel bidang Hukum Militer yang lahir di Pontianak, 12 Maret 1912. Namnya langsung melejit karena ditemukannya sebuah dokumen yang menjelaskan bahwa Soemitro bertujuan bermaksud menggantikan Soeharto. Nama Ramadi sendiri jelas terpangpang dalam di dalam dokumen tersebut. Kemudian selepas peristiwa Malari meletus, Ramadi ditangkap dan dijebloskan kebalik jeruji besi.

Berdasarkan hasil laporan yang didapat, Ramadi sedang menjabat sebagai Komisaris PT Ravitex. Bahkan tercatat menjadi anggota MPR dari Golkar sejak tahun 1971. Dari hasil pemeriksaanya Ramadi mengatakan kepada Soemitro yang telah memberikan angin segar kepada mahasiswa untuk menjalankan aksi-aksi demonstrasi. Bersama seseorang yang bernama Jayusman, Ramadi mengaku ingin membantu Soemitro guna merombak pemerintahan dan membersihkan menteri-mentri, termasuk Ali Moertopo dan Sudjono Humardani. Akibat sikap lunak Soemitro terhadap aksi mahasiswa dan keterlambatannya dalam mencegah huru-hara di tanggal 15 Januari 1974, dan kabar hubungannya dengan Ramadi menimbulkan sebuah tanda tanya besar.

Tanggapan Soemitro Soal Dokumen Ramadi

Dalam sebuah wawancara yang ditulis oleh (Tim Pustaka Utama Grafiti dalam Yogaswara, 2009) ketika ditanya benar atau tidak Soemitro ingin merebut kekuasaan, oleh seorang wartawan kepadanya “Ndak ada! ndak ada! Mereka ndak ada yang dapat membuktikan bahwa saya ingin menjadi presiden. Karena ambisi untuk menggantikan Panggabean saja saya ndak punya ambisi.” Ujar jawaban Soemitro dari hasil wawancaranya.

Namun ternyata isu bahwa Soemitro hendak menjadi Presiden santer terdengar ketika ia mulai kegiatannya guna masuk ke kampus-kampus guna berdialog bersama mahasiswa. Mengenai hal ini, ia menjelaskan bahwa kegiatannya masuk ke kampus-kampus adalah atas dasar permintaan Presiden Soeharto guna menenangkan dan meredakan amarah dari kampus-kampus yang sedang resah (Cahyono 1998). Kemudian kabar bahwa keinginan Soemitro untuk naik menjadi presiden di setimulus dengan adanya dokumen rahasia Ramadi. Bagi pak Soemitro dokumen itu dinilai sebagai trik yang dipakai oleh lawan intelejennya, karena kasus ini persis sama dengan dokumen Gilchrist (Peristiwa 1965) pada masa Orde Lama. Karena dari sumber-sumber informasi yang berhasil dikumpulkannya, Soemitro merasa yakin jikalau Ramadi adalah orang suruhan Ali Moertopo yang sengaja untuk dijadikan korban (Yogaswara 2009).

Menurut pak Soemitro sendiri bahwa Ramadi memang sengaja disingkirkan guna menutupi jejak. Karena pada sebelumnya Ramadi ini selalu dengan sengaja memberikan isu-isu ke banyak orang bahwa ia mendukung Soemitro untuk menyingkirkan Ali Moertopo dan Soedjono Humardani. Hal ini kemungkinan sengaja diciptakan guna memunculkan kesan manipulatif kalau pak Soemitro membenci kelompok Ali Moertopo.

Babak Baru Bagi Orde Baru

Sampai dengan detik ini memang belum ada yang bisa mengungkap tabir dibalik dalang peristiwa 15 Januari 1974 ini. Dari hasil penelusuran yang didapat memang menunjukkan bahwa peristiwa ini berkobar akibat adanya kompleksitas yang diakibatkan dari beberapa masalah yang mencuat diawal tahun 1970-an. Kombinasi yang ditimbulkan akibat dari kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap keadaan ekonomi yang semakin terpuruk serta merajalelanya kasus kasus korupsi, kolusi dan nepotisme bahkan kecemburuan dari penanaman pemodal asing, perpecahan pada tubuh militer dan aksi-aksi militer menyusupi kalangan mahasiswa hingga keterlibatan dari pihak asing, akibat dari adanya permasalahan tersebut terjadilah ledakan besar berupa huru-hara yang menghanguskan beberapa titik dibagian Ibu Kota Jakarta. Sebuah ledakan yang cukup mengagetkan namun tidak cukup dahsyat guna menggulingkan pemerintahan Presiden Soeharto.

Bagaimanapun hasilnya, akibat dari meletusnya peristiwa Malari telah memperlihatkan, bila rakyat kecewa dan dipadukan dengan aksi militer maka dapat menghasilkan sebuah gerakan yang dapat mengancam keselamatan dari kepemimpinan nasional. Terkait peran militer dalam peristiwa ini, Harold Crouch menilai bahwa Angkatan Darat berdiri dibawah sebuah landasan yang rapuh, sehingga menyebabkan terjadinya sebuah persaingan yang tajam di lingkungan eks militer dan dengan mudah akan mencuat kepermukaan disaat terjadi kerisis. (Harold Crouch dalam artikel "The 15 January affair in Indonesia").

Sedangkan bagi Pak Soeharto selaku presiden menilai peristiwa ini sebagai tonggak penting guna mengubah gaya kepemimpinan yang telah diterapkannya dalam sistem pemerintahan Orde Baru. Di masa selanjutnya, Presiden Soeharto hanya memilih orang-orang yang dinilai loyal guna membantu jalannya pemerintahan Orde Baru. Bahkan para Jendral yang kebanyakan berasal dari Divisi Diponegoro sengaja dibuat bergantung kepada sang Presiden. Agar ia dapat memegang segala komand militer. Bila mereka loay maka dapat dipastikan kalau hidup mereka akan sejahtera. Namun bila sedikit saja mereka menunjukkan ketidak setiaan mereka maka akan disapu bersih seperti kasus Benny Moerdani.

Kesimpulan

Peristiwa Malari terjadi pada masa pemerintah Orde Baru. Pada saat itu, pemerintah Orde Baru sedang berusaha memperbaiki kehidupan negara di berbagai bidang. Usaha-usaha yang dilakukan justru mengundang kritik dari golongan mahasiswa. Mahasiswa menganggap bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru hanya menguntungkan bagi sebagian pihak. Mahasiswa juga merasa prihatin dengan kondisi negara yang sedang dilanda krisis ekonomi serta banyaknya kasus korupsi yang sangat merugikan masyarakat. Adanya isu modal asing yang berasal dari Jepang juga menjadi salah satu faktor yang menuai kritik dari golongan mahasiswa dan masyarakat umum. Di samping itu, situasi politik yang memanas dikarenakan adanya persaingan antara kedua kelompok pegawai negara yaitu Soemitro dan Ali Murtopo juga menjadi penyebab peristiwa Malari.

Peristiwa Malari mengalami puncaknya pada tanggal 15 Januari 1974, yakni pada saat kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka. Para mahasiswa menyambut kedatangan Tanaka dengan demonstrasi. Mereka menyuarakan suara rakyat dan menuntut Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Awalnya mahasiswa merencanakan demonstrasi tanpa adanya kekerasan atau keributan, namun dalam pertengahan aksi terdapat hal-hal yang tidak terduga. Ada keikutsertaan para preman, pencuri, dan oknum lainnya yang diduga sengaja dilibatkan dalam peristiwa Malari dan membuat huru-hara dalam aksi tersebut. Oknum-oknum tersebut adalah suruhan dari Ali Moertopo yang merupakan asisten pribadi Soeharto. Pada akhirnya, peristiwa ini berakhir dengan ditahannya beberapa mahasiswa dan pihak lain yang terlibat dalam peristiwa Malari.

Bahkan dalam perjalananyapun sampai hari ini belum dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab secara pasti mengenai meletusnya peristiwa 15 Januari 1974 ini, hanya terselip tuduhan-tuduhan terkait keterlibatan PSI-Masyumi yang dinilai menunggui mahasiswa dalam kerusuhan. Bahkan di dalam pengadilan sendiri jaksa belum dapat membuktikan bahwa Hariman Siregar adalah pelaku sesungguhnya dibalik terjadinya peristiwa ini. Bahkan tujuan dari aksi massa ini ingin menggulingkan pemerintahan Orde Baru belum cukup kuat karena memang banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan di awal tahun 70-an yang menimbulkan rasa kecewa pada pemerintahan.

Peristiwa Malari telah memberikan kerugian yang sangat besar. Selain itu, dampak dari peristiwa Malari terlihat dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, semakin terlihat adanya perbaikan setelah peristiwa Malari. Dalam sistem politik, yang awalnya bersifat terbuka berubah menjadi otoriter dan pihak-pihak yang menentang pemerintah akan diadili. Dalam bidang keamanan dan pertahanan negara, setelah peristiwa Malari Soemitro mengundurkan diri sebagai Pangkopkamtib, sistem pertahanan dan keamanan juga mengalami perbaikan yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan negara yang aman dan damai.

Referensi

- Cahyono, H. (1998). *Pangkomkamtib Jendral Soemitro Dan Peristiwa 15 Januari 1974*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Disrianto, A & Sukard S. (2018). "Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) Tahun 1974 Sebagai Pembelajaran Sejarah Kelas Xii Sekolah Menengah Atas Sriguna Palembang." Kalpataru, *Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 8-21.
- Dwipayana, G., & Ramadhan K. H. (1989). *SOEHARTO: PIKIRAN, UCAPAN, DAN TINDAKAN SAYA*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Elson, R. E. (2001). *Suharto: Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Minda.
- Hadi, Dwi Wahyono, & Gayung Kusuma. (2006.) "Propaganda Orde Baru 1966-1980." *Jurnal Sosioteknologi*, 1:40-50.
- Jazimah, Ipong. (2013). "MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 3(01):9-34. doi: 10.25273/ajsp.v3i01.902.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. cetakan 1. edited by Y. Muhamad. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lailah, Aas, Iskandar Syah, & M. Syaiful. (2013). "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974." *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 1(2):11.
- Padiatra, AM. (2015). "Introduction To Malari : Dari Situasi, Aksi, Hingga Rusuh Pada Awal Orde Baru 1970 - 1974." *Criksetra*, 4(8):103-19.
- Sahasrad, H, & Muhammad R. (2020). "The Malari 1974, Press and the Soeharto's New Order: A Historical Reflection on Student Movement in the Authoritarian Era." Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): *Humanities and Social Sciences*, 3(4):2796-2806. doi: 10.33258/birci.v3i4.1289.
- Suwirta, A. (2018). "Pers Dan Kritik Sosial Pada Masa Orde Baru : Peristiwa MALARI Tahun 1974 Dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka Dan Indonesia Raya Di Jakarta." *Susurgalur Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 6(1):73-98.
- Van Dijk, C. (2000). *Pengadilan Hariman Siregar*. Jakart: Teplok Press,.
- Wirajati, YB. (2018). "Mahasiswa Dan Malari Di Jakarta: Telaah Perilaku Kolektif Mahasiswa Indonesia 1973-1974." *Jurnal Lensa Budaya*, 13(2):166-77.
- Yogaswara, A. (2009). *Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari)*. Media Pressindo.